

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. M. 2021. Analisis Rasio Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Sebelum Dan Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Pada Daerah Incumbent. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang
- Bagjana, I. F dkk. 2021. *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Konsep Dan Implementasi)*. Yrama Widya. Bandung
- Auliyah, U., Suhairi dan Nini, S. Y. 2020. Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Dan Belanja Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana Dalam Pemilukada 2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 4(1)
- Djpk.kemenkue.go.id
- Fajriyah, M. 2019. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018. *Laporan Tugas Akhir*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE). Kebumen
- Faud, M. R. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Halim, A. dan Muhammad I. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus Versi Online*,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/petahana>, diakses pada 5 Desember 2023.
- Kustono, A. S., Wulan dan Pangestu, R. E. 2020. Analisis Perbandingan pemanfaatan APBD Pos Belanja di Daerah Pemilihan Pertahanan dan Non Pertahanan. *Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola Indonesia*. 4(1)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 12 Maret 2019. Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017. Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 12 Juni 2017. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 30 Desember 2020. Jakarta

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021. *Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran APBD*. 16 April 2021. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020. *Perubahan Pendanaan Kegiatan Pemilihan*. Jakarta
- Putra, W. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Rajawali Pers. Depok
- Ratmono, D dan Mahfud S. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sari, A. M. 2023. Pengertian otonomi daerah. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-daerah/>. diakses pada 11 Oktober 2023.
- Sasmita, I. 2016. Pilkada Serentak 2017 Akan Gunakan Anggaran Apbd. <http://103.249.227.160/id/berita/bawaslu-bahas-rapbn-2017-dengan-komisi-ii>. diakses pada 7 Desember 2023 pukul 12.25 WIB.
- Setiawan, D dan Eka, S. 2018. Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Kajian Ekonomi Keuangan*. 2(2)
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Siregar, Baldric. 2021. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Suhaedi, Wirawan. 2019, Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*. 18 (2): 64-65.
- Tanjung, A. H dan Salma, R. A. 2023. Analisis Indikasi Penyalahgunaan Belanja Hibah Oleh Paslon Incumbent Pada Pemilu Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Akuntansi Dewantara (JAD)*. 7(1)
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*. 02 Oktober 2014. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 60. *Pemerintah daerah*. 02 Oktober 2014. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. *Pemerintah daerah*. 18 Maret 2015. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015. *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*. 18 Maret 2015. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 6. *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*. 01 Juli 2016. Jakarta

Utami, T., Sri R dan Muhammad G. 2022. Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera (Sebelum Dan Saat Pemilihan Kepala Daerah). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*. 7(4)

Wibhawa, H. S. H., Rusdianto, Dewi A. 2023. Fenomena Politik Anggaran Menjelang Pemilukada Pada Daerah Petahana di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Unesa*. 11(2)

